PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

UNIT KERJA : **DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAYU WIBISONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **257167**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.230.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/242 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/48 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 905.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI 250 CC SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
2. MOBIL, NISSAN MPV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, SUZUKI GX AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

140.000.000

5. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**46.800.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**736.349.434**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.918.149.434**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**100.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.818.149.434**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.